



Analisis Kinerja Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan

Safiqoh Ulva Hidayah¹, Usep Dayat², Mochamad Faizal Rizki³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 24 September 2022
Revised: 26 September 2022
Accepted: 29 September 2022

Strategic assessment is needed to analyze the performance of the state apparatus which is urgent. The procedure for analyzing the workings of the state apparatus is through evaluating and observing the results of the work that has been done, many have succeeded or failed. However, this analysis technique is weak if it is carried out objectively to government authorities. This study was conducted to observe the performance of the apparatus at the regional secretariat of Bekasi City in the governance section. Qualitative descriptive technique is a technique that is implemented in research. Then the data collection method is interviews, observation and documentation using primary data and secondary data. The research carried out resulted in the finding that the performance of the apparatus at the Bekasi City Regional Secretariat for Government Administration was seen in terms of efficiency regarding the responsibilities that must be carried out by employees and in providing good service to the community through the apparatus and the suitability of the matters conveyed.

Keywords: Apparatus performance, apparatus behavior

(*) Corresponding Author: 1810631180158@student.unsika.ac.id

How to Cite: Hidayah, S., Dayat, U., & Rizki, M. (2022). Analisis Kinerja Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 234-240. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7240798>

INTRODUCTION

Visi misi perusahaan dapat tercapai dan berjalan efektif apabila terdapat pemilahan tanggung jawab, desentralisasi kewenangan, merinci pandangan setiap orang dalam organisasi dan hal tersebut juga diimplementasikan oleh pemerintahan, perusahaan non pemerintah, maupun perusahaan yang bergerak dibidang sosial. Dalam hal ini, diperlukan seorang pemimpin untuk memimpin sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi, sehingga kegiatan dari masing-masing orang yang menjalin kerjasama bisa terstruktur.

Kegiatan pengevaluasian penting dilakukan untuk memperbaiki kinerja aparatur di Sekretariat Daerah Kota Bekasi bagian tata pemerintahan di waktu yang akan datang. Pengevaluasian dilakukan oleh sekretariat daerah yang mempunyai fungsi mengkoordinasi beserta manajemen keseluruhan lembaga pemerintahan daerah secara vertikal. Pengevaluasian berkaitan dengan penilaian quantity, quality, efektivitas layanan, dinamika beserta penyesuaian pendanaan keorganisasian.

Pengevaluasian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat berhasil tidaknya sebuah lembaga keorganisasian dalam menggapai misi yang sudah ditentukan. Mengkoordinir dan memberikan layanan administrasi merupakan fungsi dan tugas utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai lembaga pemerintah memerlukan



informasi tentang penyelenggaraan organisasi aparatur untuk dapat menilai sejauh mana tingkat kepuasan layanan yang diberikan kepada konsumen.

Isu strategis bagi pemerintahan, mengingat memiliki dampak dengan cangkupan meluas pada sektor ekonomi maupun politik yaitu isu terkait kinerja. Secara umum, kinerja dianggap sebagai tingkat keberhasilan seorang karyawan atau kinerja dalam menjalankan tugasnya berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan sipil (Mangkunegara, 2001).

Memenuhi kepercayaan tugas dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Nomor. PER/09/M.PAN/5/ 2007 pasal 12 ayat 1 dan 2 bahwa instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi kinerja secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kerja melalui penilaian yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi organisasi dan memutuskan apakah pegawai berkinerja baik serta bagaimana dengan potensi yang dimilikinya (Simamora, 2004). Selain itu, penilaian kinerja akan berdampak pada pelatihan dan tindakan korektif untuk kualitas kinerja yang dianggap masih lemah.

Sekarang, sebagian besar dari lembaga pemerintah sedang dalam proses penyelesaian. Contohnya adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang masih terkendala kapasitas pegawai, kedisiplinan, kualitas kerja hingga produktivitas yang bisa dikatakan belum sepenuhnya baik. Masih adanya berbagai kekurangan dalam menjalankan aturan kedisiplinan yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak menghormati tanggung jawab yang harus dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Analisis kinerja penting sebagai dasar perencanaan bisnis dalam mengembangkan keahlian karyawan beserta peningkatan kualitas aparatur pemerintahan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan persyaratan kinerja aparatur, riset yang dilakukan berguna dalam memahami dan menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tepatnya di Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan.

1. Pengertian Kinerja

Menurut Rivai (2008:68) berpendapat bahwa kinerja adalah bentuk kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sistem tanggungjawab secara berkala.

Didefinisikan sebagai respon terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai visi misi lembaga keorganisasian. Permasalahan kecil yang terjadi didalam keorganisasian tidak menjadi perhatian penting terkecuali menimbulkan dampak besar. Karena kurang memperhatikan hal-hal kecil tersebut berdampak pada masalah serius. Tolok ukur dalam kinerja (Dwiyanto, 2021):

1. Produktivitas

Berkaitan dengan kekuatan mental beserta kecakapan pribadi untuk melakukan peningkatan quality hidupnya.

2. Kualitas Layanan

Adanya opini yang tidak positif tentang instansi pemerintah yang timbul dari ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari instansi pemerintah. Maka kepuasan masyarakat dapat menjadi ukuran untuk menilai kinerja instansi pemerintah.

3. Responsivitas

Kecakapan lembaga keorganisasian dalam mengidentifikasi beserta menanggapi apa yang dibutuhkan komunitas. Komponen yang wajib ada sebagai tolok ukur keberhasilan lembaga keorganisasian dalam mencapai visi misinya yaitu terkait responsivitas.

4. Responsibilitas

Memaparkan terkait tatacara dalam melaksanakan agenda keorganisasian berdasarkan prosedur administrasi yang sudah ditetapkan baik tersirat maupun tersurat yaitu berkaitan dengan akuntabilitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan bagaimana kebijakan dan kegiatan instansi pemerintah diatur oleh pemimpin berdasarkan pilihan rakyat. Komponen akuntabilitas berfungsi dalam memahami ketetapan beserta agenda pemerintahan selaras atau tidak dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya tentang kecakapan kerja aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi beserta tugas pokoknya dalam menggapai visi misi keorganisasian disebut dengan kinerja.

Dalam TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme serta menerapkan sistem karir berdasarkan prestasi dengan prinsip reward and punishment.

Jadi, apabila aparatur negara memiliki sikap profesionalisme seperti yang diharapkan oleh masyarakat, maka tugas dan fungsi organisasi dapat mencapai tujuan yang sejalan dengan misi secara optimal sesuai standar tertentu yang telah disusun dan diharapkan lembaga maupun masyarakat sangat membutuhkan pelayanan pemerintah yang baik dan prima untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

2. Pengertian Aparatur

Pengertian aparatur pemerintah menurut (Setyawan 200:169) menjelaskan bahwa Aparat Pemerintah adalah pegawai yang dibayar oleh pemerintah untuk melaksanakan amanat teknis pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan.

Dalam mewujudkan pengelolaan aparatur yang optimal dan bertanggung jawab, ada beberapa ketetapan yang membahas aparatur diantaranya yaitu tentang RUU ASN di masa 2012, kemudian ditanggal 19 Desember 2013, pengesahan oleh DPR terkait ASN yang tercantum dalam UU No.5 tahun 2012. Selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh kepala negara sebagai pengganti UU No. 8 tahun 1997 tentang pokok-pokok kepegawaian pada tanggal 15 Januari 2014.

Berdasarkan KBBI, seksi bidang yang terdiri dari seksi bidang lembaga, pengurus maupun personil yang memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya perlengkapan pemerintahan disebut dengan aparat negara (Mandasari, 2017). Ada juga yang menjelaskan bahwa ASN merupakan profesi pegawai negeri yang melakukan pekerjaan di lembaga pemerintahan yang dijelaskan dalam UU No.5 tahun 2014.

METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian korelasional. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu variabel berkaitan dengan variasi variabel lainnya. Metode ini bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan. Apabila ada, seberapa erat hubungannya dan seberapa berarti hubungan tersebut. Penelitian kualitatif seringkali disebut sebagai penyelidikan naturalistik yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniti, hal ini dikarenakan penelitian kualitatif didasarkan atas teori-teori interpretasi (hermeneutika) dan pengalaman manusia (fenomenologi). Dalam penelitian kualitatif juga terdapat berbagai strategi untuk pengumpulan data dan interpretasi secara sistematis terhadap data tekstual yang diperoleh saat berbicara dengan orang-orang atau melalui pengamatan.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan keluarga di Desa Pasirkaliki Kabupaten Karawang di Tahun 2021. Selain menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan metode untuk mengumpulkan data pendukung dalam penelitian, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah sumber data utama, peneliti mengumpulkan data-data tersebut dari lapangan seperti pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Data Sekunder merupakan pendukung agar dapat menyempurnakan data primer, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Kinerja Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Dalam mengetahui tingkat berhasil tidaknya visi misi yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya penilaian kinerja. Bagi lembaga keorganisasian adanya penilaian atau evaluasi kinerja berguna dalam hal mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga keorganisasian tersebut.

1. Efektivitas

Efektifitas aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi diukur dari tingkat pengetahuan aparat penegak tentang job description dan banyaknya masalah yang dapat dipecahkan beserta tingkat rasa puas masyarakat atas layanan yang sudah diberikan. Melihat kondisi di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman sasaran dari Sekretariat Daerah Kota Bekasi di antara pegawai tidak buruk. Sekretariat Daerah Kota Bekasi berfungsi dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab di lembaga pemerintahan beserta memiliki tanggung jawab dalam layanan keadministrasian pada semua departemen daerah. Keterlambatan dalam menyelesaikan tugas aparatur terutama pada bidang keadministrasian untuk melakukan pengukuran efektif tidaknya dalam menjalankan fungsi aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan.

Sedangkan mengenai rasa puas atas pemberian layanan oleh aparat pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan, secara umum dapat dinilai cukup baik yaitu masih terdapat keluhan dari pengguna layanan meskipun dengan intensitas yang relatif rendah.

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa telah dilakukan secara optimal dan dapat dikatakan efisiensi aparatur di Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan relatif baik meskipun pada kenyataannya masih terdapat keluhan dari pengguna layanan.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kinerja fungsi aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan dilihat dari pengetahuan tugas dan pekerjaan kantor, tanggung jawab untuk penyelesaian masalah, tepat pada penyelesaian masalah berkas dan jumlah penyelesaian masalah berkas dapat dianggap baik. Meskipun masih ada aparat yang menunda pekerjaan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam memperbaiki masalah.

2. Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan kepada masyarakat diukur dengan spontanitas dalam menangani masalah, tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah/pekerjaan dan sopan santun dalam pemberian layanan.

Terdapat berbagai indikator yang menjadi pengaruh kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat umum dan jika terdapat masalah cara penyelesaiannya pun membutuhkan berbagai pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam konteks ini, Sekretariat Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan merupakan media pelayanan administrasi yang akan terus melakukan tindakan korektif di semua aspek operasi untuk meningkatkan kinerja aparaturnya, mengingat semakin cenderung memiliki keluhan dari pengguna layanan untuk layanan yang disediakan ASN.

Permasalahan terkait kualitas layanan berkaitan dengan tingkat rasa puas masyarakat atas layanan yang diberikan sehingga bisa mempengaruhi tingkat kecakapan kerja lembaga keorganisasian. Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan indikator kualitas layanan sebagai tolok ukur kecakapan kerja lembaga keorganisasian adalah data terkait kualitas layanan mudah didapat serta lebih ekonomis.

Dari uraian di atas terkait kualitas pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan dapat dilihat pada aspek spontanitas dalam memecahkan masalah, tanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan, sopan santun, ramah tidaknya dalam memberikan layanan kepada masyarakat dikategorikan terdapat kekurangan, maka dari itu memerlukan tindak lanjut pemimpin Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

3. Responsivitas

Indikator yang diterapkan dalam riset untuk menilai responsivitas yaitu melalui respon dari aparat mengenai perihal yang dibutuhkan masyarakat, cara penyusunan program kerja beserta pengembangan program kerja yang sudah ada sebelumnya yang diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, responsivitas mengukur daya tanggap aparatur di Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan terhadap harapan, keinginan, aspirasi, dan kebutuhan pengguna jasa.

Dari perolehan data melalui wawancara didapatkan data mengenai usaha untuk menanggapi keluhan dari pengguna layanan yaitu dengan menyediakan layanan menerima saran dan membuka akses bagi orang dalam memberikan kritik, saran, tanggapan maupun keluhan. Mengingat relevansi kegiatan dengan kebutuhan

norganisasi, maka pelayanan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi dilaksanakan secara responsif. Fakta ini menyebabkan serangkaian upaya dilakukan, yaitu mengoreksi dan mengevaluasi sejumlah masalah sehingga ditemukan solusi oleh pimpinan dengan pegawai.

Berdasarkan observasi peneliti didapatkan data mengenai upaya peningkatan layanan yang diinginkan dari pengguna layanan dan dapat disimpulkan bahwa layanan aparat di Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan cukup baik menanggapi keluhan dari pengguna layanan.

4. Responsibilitas

Kecakapan aparat dalam menanggapi keluhan dari masyarakat disebut dengan responsibilitas dan kemudian dikaitkan dengan hasil kinerja. Maka dari itu, kategori pertanggung jawaban bisa diamati pada hubungan aktivitas beserta ketetapan UU yang berlaku. Dalam komponen ini dijelaskan kinerja aparat apa sesuai dengan peraturan atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa evaluasi kinerja dalam hal responsibilitas aparat Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan didasarkan pada tingkat pemahaman aparat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini cukup baik.

5. Akuntabilitas

Berkaitan dengan tanggung jawab administrator, pengungkapan beserta pelaporan semua kegiatan dan menjadi tanggung jawab yang memiliki wewenang. Rasa tanggung jawab ini adalah makna filosofis dasar dalam manajemen sektor publik. Tantangan tersulit sebenarnya datang dari sumber daya lembaga itu sendiri. Rendahnya kedisiplinan, serta permasalahan internal lainnya di antara pemerintah daerah ternyata menjadi kendala signifikan bagi kinerja pemerintah daerah. Walaupun itu, Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahannya. Terkait penjelasan di atas ditemukan bahwa penilaian kinerja dalam hal akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan tercermin dari kinerja laporan pertanggungjawabannya cukup baik.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menjelaskan efektivitas Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Pasirkaliki Kabupaten Karawang, dari lima indikator pengukuran efektivitas kebijakan (Kettner. et al, 2008) dapat peneliti mengambil kesimpulan bahwa program tersebut sudah efektif pada proses pelaksanaannya, karena dapat memenuhi empat dari lima indikator pengukuran.
2. Berdasarkan metode korelasional yang peneliti lakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel efektivitas program P2L dapat berkorelasi dengan variabel Ketahanan Pangan Keluarga, maka peneliti mengelompokkan hal ini menjadi empat poin. Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa program Pekarangan Pangan Lestari masih tidak efektif karena belum cukup untuk memenuhi empat faktor keberhasilan ketahanan pangan keluarga.

REFERENCES

- Dwiyanto, Agus. "Reformasi birokrasi publik di Indonesia." UGM PRESS (2021).
- Mandasari, Pika, H. Adam Idris, M. Si, Letizia Dyastari, S. Sos, and M. Si. "Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Kualitas Birokrasi Di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang." (2017).
- Mangkunegara, A. A. "Manajemen Sumber Daya Manusia Alih Bahasa." Jakarta: Salemba Empat (2001).
- Rivai, Veithzal. "Evaluasi Kinerja Melahirkan Pemerintahan yang Akuntabel." dalam Agus Wahyuadianto, Meretas Jalan Menuju Good Governance, Bandung: LAN (2008): 57-90.
- Salam, Dharma Setyawan. "Manajemen Pemerintahan Indonesia." Jakarta: Penerbit Djambatan (2004).
- Simamora, Henry. "Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 1, cetakan pertama." (2004).
- Sugiyono, Metode. "Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta (2008).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)